

Sistem Pengadaan di Sumut Rawan

Dari Halaman 1

menjadi area rawan korupsi. "Hal ini sekaligus mengonfirmasi temuan dalam kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK di wilayah Sumut," ujar dia. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, skor rerata nilai seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Utara yaitu 70,28. Sedangkan khusus untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh skor 58,55 atau masuk kategori rentan. "Faktor penyebab rendahnya skor tersebut di antaranya karena lemahnya pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dalam proses pengangkatan, pemindahan, hingga pemberhentian aparatur sipil negara (ASN), serta pengelolaan pengadaan

barang dan jasa, di mana kedua sektor tersebut skornya masih di bawah 60," ucap dia. Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Rusuli Efendi Siregar (RES), Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja P2N Wilayah I Sumatera Utara, Heliyanto (HEL), Direktur Utama PT DNG, M Akhirun Efendi Siregar (KIR), serta Direktur PT RN, M Rayhan Dulamsi Pilang (RAY). Penindakan ini menyeret pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi

Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Saterk P2N) Wilayah I Sumut. KPK juga membuka peluang untuk memanggil Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam pengusutan kasus tersebut. "Kalau memang bergerak ke salah satu orang, misalnya ke kepala dinas lain atau gubernurnya, tentu akan kami minta keterangan. Kami akan panggil, tunggu saja ya," ujar Plt Deputy Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025). KPK sebelumnya menggelar dua operasi tangkap tangan (OTT) terkait proyek jalan di Sumatera Utara. Dari hasil penelusuran, total nilai proyek yang diduga bermasalah mencapai Rp 231,8 miliar.(kps/js)

KPK Akan Kesulitan Jerat Bobby

Dari Halaman 1

OTT proyek jalan di Kabupaten Paluta akses Labuhanbatu, juga korupsi proyek di Pemko Medan," ungkap Direktur Rumah Inspirasi Indonesia (RII) Rinno Hadinata S.Sos kepada wartawan di Medan, Minggu (6/7/2025). Menurut Rinno, tersangka Topan Ginting tidak akan berani berbuat dan bertindak jika tidak ada persetujuan dari Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam proyek strategis jalan

provinsi jalur Paluta akses Labuhanbatu tersebut. "Pertama, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, dan kedua aliran dana dari Topan Ginting yang bisa menerjerat Bobby Nasution jadi tersangka," kata Rinno. KPK pun harus berani menggali keterangan dari pengakuan Topan Ginting yang merupakan orang kepercayaan Bobby Nasution sejak di Pomko Medan. "Khusus aliran dana, KPK harus mengetahui

rekening badan hukum baik itu PT atau yayasan, serta oknum yang menampung. Karena aliran dana masuk ke Bobby Nasution kabarnya dalam bentuk mata uang asing," tegas Rinno. Namun begitu, Rinno juga merasa KPK akan kesulitan menjerat Bobby Nasution jika tidak mampu mengungkap kedua poin tersebut melalui Topan Ginting. "Yang terpenting KPK harus punya nyali dan keberanian untuk menjerat Bobby Nasution menjadi tersangka," tutupnya.(bj)

OTT KPK di Sumut, Sirene Darurat,

Dari Halaman 1

berulang. Kasus ini tak berdiri sendiri. Sebelumnya, Sumut sudah mencatat banyak nama besar dalam daftar tersangka korupsi, dari bupati hingga gubernur. Sayangnya, meski OTT sudah berkali-kali dilakukan, efek jera nyaris tak terlihat. Seolah-olah, penangkapan hanya membuat permukaan tenang sesaat, tapi bara korupsi tetap menyala di dalam. Sistem birokrasi kita masih memberi ruang lega bagi praktik suap, mark-up proyek, dan jual beli kewenangan. Lebih ironis lagi, OTT kali ini muncul bukan karena kerja sistem internal pengawasan, melainkan karena protes warga soal jalan rusak. Situasi ini mencerminkan satu hal: mekanisme deteksi dini korupsi belum bekerja. OTT justru menjadi semacam sirene darurat, bukan tindakan pencegahan. Akademisi menilai, birokrasi yang permisif, pengawasan internal yang lemah, dan budaya politik transaksional menjadi penyubur utamanya. Korupsi bukan hanya kelalaian, tetapi bagian dari skema terencana yang berulang.

Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas Dalam banyak kasus, penegakan hukum tampak selektif. Istilah "tajam ke bawah, tumpul ke atas" bukan sekadar sindiran, tapi realitas. Para pejabat level menengah dengan mudah dijerat, sementara aktor di balik layar—entah patron politik, mafia proyek, atau elite yang mengatur arah anggaran—masih sering lolos dari jeratan hukum. Indikasi penghilangan bukti elektronik hingga intimidasi terhadap saksi menjadi sinyal bahwa integritas proses hukum kita belum sepenuhnya steril dari tekanan. Sektor infrastruktur menjadi arena favorit para pelaku korupsi. Nilai proyek yang besar, prosedur lelang yang bisa direayasa, hingga celah manipulasi dalam sistem e-catalog menjadi peluang empuk. Tak jarang, proyek pemerintah berubah jadi bancakan. Di balik papan proyek yang menjanjikan kemajuan, ada praktik curas yang menghambat pembangunan dan melukai rasa keadilan masyarakat. OTT Mandailing Natal sebenarnya membuka pintu untuk penyelidikan yang lebih luas. KPK menyatakan akan menelusuri dugaan korupsi dalam proyek lain dan menyoroiti kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak baru. Namun publik bertanya-tanya: apakah proses ini akan sampai ke akar? Ataukah kembali berhenti di

level menengah? Sayangnya, kejaksaan dan kepolisian di daerah kerap kali hanya menyentuh kasus kecil. Bukan karena tidak tahu, tapi karena keterbatasan sumber daya, minim dukungan teknis, dan dalam banyak kasus, tekanan politik. Hal ini memperkuat ketimpangan hukum dan memberi ruang aman bagi para "ikan kakap" untuk tetap berenang bebas. Patronase dan Ongkos Politik Mahal Lebih jauh, ekosistem politik di Sumut tak bisa dilepaskan dari persoalan ini. Sistem patronase dan ongkos politik yang mahal mendorong para pejabat mengumpulkan "modal balik" dari proyek-proyek publik. Lelang bisa diatur, pelak-sana proyek bisa disetir, dan semua itu dibungkus dengan dalih pembangunan. Tanpa reformasi menyeluruh—baik di sisi birokrasi, pengadaan, maupun penegakan hukum—upaya pemberantasan korupsi akan seperti memukul angin. Diperlukan keberanian lebih dari KPK, keberpihakan dari publik, dan komitmen dari pemangku kepentingan agar sistem tak terus-menerus melahirkan koruptor baru. OTT hanyalah awal. Tapi jika akar masalah tidak dicabut, Sumatera Utara hanya akan menyaksikan episode dari drama lama: korupsi yang tak pernah selesai.(*)

Tom Lembong Sebut Kejagung Tak Profesional

Dari Halaman 1

terhadapnya telah mengabaikan fakta-fakta persidangan. "Saya kira sangat jelas ya, kalau tidak ada pengeseran, tidak ada penyesuaian sedikitpun ya dari dakwaan, di pertengahan atau akhir Februari sampai kemudian empat bulan sidang, sampai penuntutan itu tidak ada penyesuaian sama sekali," kata Tom. Dia menilai dakwaan sudah dipatahkan oleh

saksi maupun ahli yang telah dihadirkan di persidangan-persidangan kasus ini. Namun demikian, surat tuntutan tersebut mengabaikan itu semua dan kembali lagi ke dakwaan yang sudah dipatahkan oleh saksi dan ahli. "Dan dalam penuntutan hari ini yang disampaikan oleh jasa penuntut seolah-olah keterangan yang mematahkan tuduhan itu tidak pernah terjadi. Padahal kan ada transkrip persidangan dan karena sidang ini terbuka untuk umum transkrip persidangan itu akan selalu ada dan di era digital kita ketahui bahwa jejak digital itu

abadi," tutur Tom. Dia menjelaskan, importasi gula adalah kebijakan rutin sejak 2004. Dia merasa tuntutan tujuh tahun penjara terhadapnya mengejutkan. "Jadi saya cukup amaze, cukup menganggap ini luar biasa," ujarnya. Tom dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan penjara. Ia dinilai terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 578 miliar dan memperkaya orang lain dalam importasi gula 2015-2016.(kps/js)

KPK Akan Dalam Dokumennya

Dari Halaman 1

dokumen-dokumen itu akan kami pelajari lebih lanjut," kata Juru Bicara Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/7/2025). "Bahasanya bukan diselidiki ya, tapi akan dipelajari dokumen-dokumen itu," sambung dia. Budi juga mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk berhati-hati dengan potensi penerimaan gratifikasi dan konflik kepentingan. Dia mengatakan, gratifikasi dan konflik kepentingan tidak hanya dalam bentuk barang dan jasa, melainkan juga fasilitas dan perlakuan. "Karena gratifikasi ataupun konflik kepentingan itu tidak hanya dalam bentuk barang

dan jasa, tapi juga bisa dalam bentuk fasilitas, perlakuan, dan sebagainya," ujar dia. Ia mengatakan, modus penerimaan gratifikasi dan konflik kepentingan itu tidak hanya langsung kepada penyelenggara negara saja, melainkan juga kepada keluarga dan kerabat. "Dan modusnya juga bisa tidak langsung kepada penyelenggara yang bersangkutan, tapi bisa juga melalui keluarga, kerabat, atau pihak-pihak terkait lainnya," tutur dia. Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, sudah menyampaikan dokumen-dokumen perjalanan istrinya selama di Eropa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maman mengatakan, tidak ada penyalahgunaan wewenang terkait perjalanan istrinya ke Eropa. Sebab, kata dia, biaya perjalanan istri dan anaknya selama di Eropa menggunakan

dana pribadi. "Saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayarannya tiket langsung dari rekening pribadi istri saya. Itu satu," kata Maman, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/7/2025). Maman mengatakan, tiket pesawat, biaya makan, kendaraan, dan hotel selama berada di Eropa berasal dari rekening pribadi istrinya. "Uang makan dan untuk catering istri saya makan di sana dan sewa kendaraan dari rekening istri saya pribadi. Yang ketiga, uang pemesanan hotel di sana pun dari uang pribadi, dan itu sudah dibayarkan dari bulan Mei," ujarnya. "Artinya, tidak ada sedikit pun niat kita dari awal menggunakan fasilitas-fasilitas siapapun," sambungnya.(kps/js)

30 Selamat, 7 Tewas, 28 Masih Dicari

Dari Halaman 1

penumpang dalam kondisi meninggal dunia di wilayah selatan Selat Bali. Dengan ditemukannya satu orang korban meninggal pada hari keempat pencarian ini, jumlah korban meninggal bertambah menjadi tujuh orang. Selain itu, 30 orang ditemukan selamat dan 28 orang masih dalam pencarian. Saat ini Tim SAR gabungan bersiap melakukan penyelaman ke bangkai kapal. Namun, operasi penyelaman masih menunggu proses finalisasi data hidrografi yang sedang diolah oleh tim dari KRI Faniildo dan pakar hidrografi. "Kita sudah mendapat arahan dan mengevaluasi dari datum yang kemarin dengan menunggu hasil data dari kapal KRI Faniildo dan tim expert dari hidrografi untuk menjadi lebih jelas lagi," kata Deputy Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno, di Banyuwangi Minggu (6/7). Menurut Ribut, KRI Faniildo kembali akan menuju lokasi untuk menurunkan ROV (remotely operated vehicle) sekaligus mengumpulkan data visual bawah laut. Secara paralel, para penyelam profesional juga tengah menyiapkan perlengkapan serta kondisi mental sebelum terjun ke dalam laut. "Para penyelam sedang menyiapkan alat-peralatan dan kondisi mental mereka," katanya. Saat ini, total penyelam yang siap diturunkan berjumlah 37 orang. Dari total 22 penyelam awal,

beberapa di antaranya tidak dapat diterjunkan karena alasan medis dan akan beralih menjadi tenaga pendukung. Sebagai penguatan, TNI AL menambah 15 penyelam lagi. "Untuk jumlah penyelam dari yang 22 sudah di medical check up ada beberapa yang tidak bisa kita turunkan sebagai penyelam. Mungkin akan menjadi tenaga pendukung. Kemudian dari TNI AL ada tambahan 15 orang. Jadi 22 tambah 15 [penyelam]," ucapnya. Selain itu, pihak Basarnas juga menyiapkan sebuah kapal tender yang serupa dengan KMP Tunu untuk mendukung operasi penyelaman. Jika seluruh persiapan rampung dan kondisi mendukung, penyelaman bisa segera dilakukan hari ini. "Kita akan lakukan dengan memperhatikan faktor safety lingkungan dan tidak mengganggu transportasi yang ada," tegas Ribut. Hingga hari keempat, belum ada lagi tambahan korban yang ditemukan. Ribut menyatakan hal itu memunculkan dugaan adanya korban yang terjebak di dalam badan kapal. Namun dugaan itu perlu dibuktikan melalui observasi bawah laut. "Peluang [korban terjebak di badan kapal] itu bisa saja terjadi. Saya menyampaikan mungkin patut diduga. Saya belum bisa memastikan," kata dia. "Itu bisa pasti manakala observasi bawah air dengan ROV sudah kita dapatkan. Kemudian kita menurunkan penyelam, mengobservasi secara fisik langsung di palka-palka dan di benda barang yang ada di situ. Karena penyelam harus turun

mengecek palka-palka dan ruangan-ruangan di dalam kapal tersebut," tambahnya. Meski demikian, operasi penyelaman masih menunggu pengolahan data mentah yang dikumpulkan tim hidrografi. Data sementara menunjukkan kemiripan antara lokasi bangkai kapal dengan lokasi kecelakaan, yang disebutnya mengalami pergeseran sekitar 800 meter dari titik awal. "Secara data mentah gambar yang lokasi ada di sampai saya sampaikan kemarin bergeser dari lokasi kecelakaan kapal ke lokasi terbaru itu kurang lebih 800 meter dan hasil penggambaran data mentah dari tim hidrografi hampir serupa," ucapnya. Seperti diketahui KMP Tunu Pratama Jaya dikabarkan tenggelam dalam perjalanan dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali Rabu (2/7) malam. Petugas jaga Syahbandar melihat kapal tenggelam sekitar Pukul 23.35 WIB. Posisi terakhir kapal terlihat di perairan Selat Bali pada koordinat 8° 9'32.35"S 114°25'6.38. Hingga hari keempat pencarian, Minggu (6/7) pagi, dari total 65 penumpang dan awak kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tercatat dalam manifest, sebanyak 37 orang di antaranya sudah ditemukan. Dari 37 korban yang ditemukan, 7 orang di antaranya dalam kondisi meninggal dunia, kemudian 30 orang selamat. Sedangkan 28 orang lainnya masih dalam pencarian. (cnni/js)

"Fit and Proper Test"

Dari Halaman 1

"Kalau tidak salah pagi ini ada beberapa negara yaitu calon duta besar Amerika Serikat, calon duta besar Jerman, calon duta besar PBB, Singapura, Jepang, dan Slovakia," kata Budi. Dia menjelaskan, dalam proses nanti, para anggota Komisi I DPR akan mendengarkan pemahaman geopolitik dan posisi Indonesia di kancah global. "Pengalaman mereka selama ini, mungkin cara-cara mereka nanti untuk menjalankan diplomasi luar negeri di negara-negara (tempat ditugaskan) tersebut," ujar Budi. Setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, Komisi I akan rapat secara internal untuk hasilnya diberikan kepada pimpinan DPR. (kps/js)

Kawasan Puncak

Dari Halaman 1

jiwa, usianya 22 tahun, jenis kelamin laki-laki berasal dari Cianjur. (Korban) Sudah dievakuasi dan jenazah langsung dibawa ke rumah duka di Cianjur," kata Bupati Bogor Rudi Susmanto, Minggu (6/7). "Lokasi (longsor) kedua ada di Kecamatan Cisarua, proses pencarian korban masih dilakukan. Diidentifikasi awal ada lima korban (tertimbun longsor), tiga korban sudah ditemukan dan kondisinya selamat sudah dibawa ke rumah sakit dan masih ada dua korban lagi yang masih proses pencarian," lanjutnya. Rudy mengatakan, bencana longsor banjir terjadi imbas hujan deras di kawasan Puncak, Bogor, pada Sabtu (5/7). Sejumlah titik banjir saat ini sudah surut dan petugas masih berada di beberapa titik bencana untuk melakukan penanganan. "Informasi di lokasi yang tadi banjir cukup tinggi di beberapa titik kondisinya sudah surut. Hari ini pemerintah fokus penyelamatan korban, kedua memberikan bantuan logistik untuk masyarakat yang terkena dampak dari banjir dan longsor," katanya. Dihubungi terpisah, Ketua Tim Kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor Andi mengatakan, saat ini proses pencarian terhadap korban tertimbun longsor di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua masih dilakukan. Tim SAR gabungan BPBD, TNI, Polri, Damkar dan Tagana sudah di lokasi untuk melakukan evakuasi. (cnni/js)



Alarm KPK Tak Boleh Abaikan

Dari Halaman 1

disebut sebagai laboratorium kasus-kasus korupsi, mulai dari praktik fee proyek, permainan tender, mark-up anggaran, hingga pengadaan fiktif. Bila korupsi sudah dianggap sebagai "biaya operasional" dalam pemerintahan, maka yang dikorbankan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga kepercayaan publik dan potensi kemajuan daerah. KPK tidak asal bicara. Data dan temuan mereka menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pengadaan barang dan jasa menjadi ladang basah korupsi. Di Sumut, sejumlah kepala daerah, pejabat OPD, hingga rekanan swasta telah terjerat kasus yang berasal dari permainan proyek. Kita masih ingat bagaimana mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, terjerat kasus bansos dan hibah yang berkaitan erat dengan penyalahgunaan kewenangan. Begitu pula kasus-kasus di level kabupaten/kota, seperti Labuhanbatu, Deli Serdang, hingga yang terbaru—penangkapan Kadis PUPR Sumut dan beberapa pejabat lainnya dalam kasus proyek infrastruktur. Semua ini memperkuat bukti bahwa sistem pengadaan di Sumut tak hanya lemah, tapi telah menjadi ekosistem koruptif yang tumbuh subur tanpa kontrol.

Sistem pengadaan semestinya menjadi mekanisme transparan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan akuntabel. Namun dalam praktiknya, banyak proyek yang sudah "diatur" sebelum lelang dimulai. Mulai dari syarat-syarat tender yang hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan tertentu, proses penunjukan langsung yang menyimpang, hingga praktik fee 10-20 persen yang seolah sudah menjadi budaya diam-diam.

Ada tiga akar masalah yang membuat pengadaan di Sumut tetap rawan korupsi meskipun regulasi sudah diperbaiki dan sistem digital (LPSE) sudah diberlakukan.

Pertama, mentalitas pejabat. Banyak ASN yang terlibat dalam pengadaan memiliki integritas lemah dan lebih memilih jalan pintas demi kepentingan pribadi atau kelompok. Posisi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau Panitia Lelang sering digunakan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan melayani rakyat.

Kedua, intervensi politik dan elit lokal. Di banyak daerah, proyek pengadaan kerap menjadi "jatah" bagi orang-orang tertentu, terutama yang berjasa dalam proses politik atau pilkada. Ini menciptakan tekanan terhadap ASN pengelola proyek untuk "bermain aman" dengan mengakomodasi permintaan penguasa informal.

Ketiga, lemahnya pengawasan internal. Inspektorat daerah, BPKP, dan DPRD sering kali tidak menjalankan fungsi kontrol secara optimal. Bahkan tak jarang mereka menjadi bagian dari skema pembiaran atau justru ikut menikmati "keuntungan" dari proyek bermasalah.

Pernyataan KPK tidak boleh dianggap angin lalu. Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah kabupaten/kota harus menjadikan ini sebagai momentum pembenahan serius, bukan sekadar klarifikasi normatif di media.

Pertama, lakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek strategis yang berlangsung selama dua tahun terakhir. Libatkan lembaga independen untuk menelusuri pola pengaturan proyek dan potensi konflik kepentingan.

Kedua, kembangkan sistem pengadaan berbasis transparansi dan partisipasi publik. Dokumen tender, kontrak proyek, hingga progres fisik harus dapat diakses publik secara daring. Keterlibatan masyarakat sipil dan jurnalis investigasi sangat penting sebagai bagian dari kontrol sosial.

Ketiga, perkuat perlindungan whistleblower. Banyak ASN yang sebenarnya tahu permainan busuk di balik proyek, tetapi takut melapor karena ancaman mutasi atau tekanan politik. KPK dan Ombudsman harus membuka kanal pelaporan yang aman dan rahasia.

Keempat, pemimpin daerah harus menjadi contoh nyata antikorupsi. Gubernur, bupati, dan wali kota harus bersih dari konflik kepentingan proyek. Jangan sampai proyek pengadaan menjadi alat bagi penguasa untuk balas budi kepada tim sukses atau jaringan politik.

Korupsi pengadaan bukan hanya soal angka dan pasal hukum. Ia adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan sabotase terhadap kemajuan daerah. Jika Sumatera Utara ingin bangkit dari stigma daerah sarang korupsi, maka pembenahan sistem pengadaan adalah langkah awal yang tidak bisa ditunda.

Pernyataan KPK mestinya menjadi cambuk, bukan sekadar headline. Ini saatnya Sumut membuktikan bahwa ia mampu keluar dari bayang-bayang kelam birokrasi transaksional dan berani menegakkan integritas dalam setiap rupiah yang dibelanjakan atas nama rakyat.